

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Taufiqurrahman¹, Siti Julaiha², Bahrani³

¹²³Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹taufiq15.tr@gmail.com, ²sitijulaiha@uinsi.ac.id, ³bahrani@uinsi.ac.id

ABSTRACT

The implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) is a strategic instrument for strengthening the Internal Quality Assurance System (SPMI) in Islamic educational institutions. This study aims to examine the urgency of SOPs, the mechanism for their development, and the main obstacles to their implementation in quality assurance practices. The study used library research with a qualitative descriptive analytical approach. Data were collected through documentation of books, regulations, and relevant scientific literature, then analyzed using content analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that SOPs help translate institutional quality policies into measurable, consistent, and accountable operational procedures. SOPs also support the quality assurance cycle through standard setting, implementation, evaluation, control, and continuous improvement. The main obstacles include organizational resistance, limited managerial literacy, limited digital infrastructure, and weak coordination among institutional units. These obstacles can be addressed through participatory SOP development, transformational leadership, staff training, digitalization of SOP documents, periodic internal quality audits, and a reward system for compliant work units. Therefore, SOPs should not be treated only as administrative documents, but as practical instruments for building sustainable quality culture in Islamic educational institutions.

Keywords: Standard Operating Procedure, Internal Quality Assurance System, Islamic Educational Institution

ABSTRAK

Implementasi Standard Operating Procedure (SOP) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi SOP, mekanisme penyusunan SOP, serta kendala utama dalam implementasi SOP pada praktik penjaminan mutu. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi buku, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SOP membantu menerjemahkan kebijakan mutu lembaga ke dalam prosedur operasional yang terukur, konsisten, dan akuntabel. SOP juga mendukung siklus penjaminan mutu melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara berkelanjutan. Kendala utama implementasi SOP meliputi resistensi organisasi, keterbatasan literasi manajerial, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya koordinasi antarunit. Kendala tersebut dapat diatasi melalui penyusunan SOP secara partisipatif, kepemimpinan transformasional, pelatihan staf, digitalisasi dokumen SOP, audit mutu internal berkala, dan sistem penghargaan bagi unit kerja yang patuh terhadap standar.

Dengan demikian, SOP tidak seharusnya dipahami sebagai dokumen administratif semata, tetapi sebagai instrumen praktis untuk membangun budaya mutu berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: Standard Operating Procedure, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh tata kelola lembaga yang mampu menjamin proses pendidikan berjalan sesuai standar. Di Indonesia, lembaga pendidikan dituntut menyelenggarakan layanan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut menempatkan mutu sebagai tanggung jawab kelembagaan, bukan sekadar urusan administratif yang muncul ketika akreditasi dilakukan.

Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks karena lembaga harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan akuntabilitas publik. Lembaga pendidikan yang tidak memiliki sistem kerja baku cenderung menghadapi

masalah koordinasi, tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi layanan, dan kesulitan dalam mengevaluasi capaian mutu. Kondisi ini menjadi lebih krusial pada lembaga pendidikan Islam karena mutu layanan perlu berjalan sejalan dengan nilai profesionalisme, amanah, dan keteraturan kerja. Oleh karena itu, penjaminan mutu perlu diterjemahkan ke dalam prosedur yang mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh semua unsur lembaga.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi kerangka penting dalam memastikan setiap proses pendidikan berjalan melalui siklus perbaikan berkelanjutan. Dalam praktiknya, siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan perlu didukung oleh instrumen operasional yang jelas agar tidak berhenti pada dokumen kebijakan. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pentingnya budaya mutu dalam

satuan pendidikan. Namun, banyak lembaga masih mengalami kesulitan menerjemahkan kebijakan mutu menjadi tindakan teknis yang konsisten di tingkat kelas, administrasi, layanan peserta didik, dan pengelolaan sarana prasarana.

Dalam konteks tersebut, Standard Operating Procedure (SOP) memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebijakan mutu dan pelaksanaan kerja harian. SOP memberikan panduan baku mengenai siapa melakukan apa, kapan kegiatan dilakukan, dokumen apa yang diperlukan, serta indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses. Tanpa SOP yang jelas, penjaminan mutu cenderung berjalan secara sporadis dan sangat bergantung pada gaya kerja individu atau figur pimpinan tertentu. Arcaro (1995) menegaskan bahwa mutu pendidikan perlu dikelola melalui standar yang dapat dipahami, dilaksanakan, dan dievaluasi secara konsisten.

SOP juga membantu lembaga membangun transparansi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan akademik dan nonakademik dapat dilacak melalui alur kerja yang terdokumentasi. Hal ini memudahkan

pimpinan, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain untuk melihat apakah proses layanan telah berjalan sesuai standar. Mulyasa (2009) menekankan bahwa manajemen berbasis sekolah membutuhkan instrumen pengelolaan yang mendorong partisipasi, efektivitas, dan tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, SOP dapat menjadi alat kontrol sekaligus alat pembelajaran organisasi.

Walaupun penting, implementasi SOP di lembaga pendidikan Islam tidak selalu berjalan mudah. Beberapa lembaga masih memandang SOP sebagai beban birokrasi, bukan sebagai kebutuhan manajemen. Hambatan lain muncul dari keterbatasan literasi mutu, rendahnya disiplin dokumentasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya dukungan teknologi informasi. Masalah tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang SOP penjaminan mutu masih relevan untuk dibahas, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang sedang memperkuat tata kelola mutu dan daya saing kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji urgensi SOP dalam SPMI, menjelaskan

mekanisme penyusunan dan implementasi SOP penjaminan mutu, serta mengidentifikasi kendala dan solusi strategis dalam penerapannya. Fokus pembahasan diarahkan pada lembaga pendidikan Islam, terutama pada aspek manajerial yang berhubungan dengan penguatan budaya mutu. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengelola pendidikan dalam membangun prosedur kerja yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Studi kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, teori, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu tentang SOP, SPMI, manajemen mutu, dan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat menggunakan dokumen sebagai sumber data ketika peneliti berupaya memahami makna, pola, dan hubungan konseptual dalam suatu fenomena.

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas buku manajemen pendidikan, literatur manajemen mutu, regulasi pendidikan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan penjaminan mutu dan implementasi SOP. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus kajian. Fokus tersebut meliputi urgensi SOP dalam penjaminan mutu, mekanisme penyusunan SOP, pelaksanaan SOP, kendala implementasi, dan strategi perbaikan.

Data dianalisis menggunakan analisis isi. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan ke dalam tema-tema pembahasan. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan konsep SOP, SPMI, budaya mutu, kepemimpinan, dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan disusun berdasarkan pola hubungan konseptual yang ditemukan dalam literatur.

Untuk menjaga ketepatan analisis, kajian ini menggunakan pembacaan silang antar sumber. Setiap gagasan utama dibandingkan dengan sumber lain yang memiliki keterkaitan topik. Langkah ini dilakukan agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menunjukkan hubungan antara kebijakan mutu, prosedur operasional, dan praktik manajemen lembaga pendidikan Islam.

C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

1. Urgensi dan Peran Strategis

SOP dalam Sistem Penjaminan

Mutu Internal

Hasil kajian menunjukkan bahwa SOP memiliki peran strategis dalam memperkuat SPMI karena SOP mengubah kebijakan mutu menjadi tindakan operasional. Kebijakan mutu sering kali bersifat umum, sedangkan unit kerja membutuhkan panduan teknis yang lebih rinci. SOP menjawab kebutuhan tersebut dengan menyusun alur kerja yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, pihak yang bertanggung jawab, langkah kerja, standar waktu, dokumen pendukung, dan indikator keberhasilan. Dengan adanya unsur

tersebut, lembaga dapat mengukur apakah suatu proses berjalan sesuai standar atau belum.

Dalam lembaga pendidikan Islam, SOP juga berfungsi memperkuat prinsip itqan, yaitu kesungguhan dan ketepatan dalam bekerja. Qomar (2021) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai religius dengan prinsip profesionalitas kelembagaan. Nilai tersebut dapat diwujudkan melalui prosedur kerja yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP membantu guru, tenaga kependidikan, dan pimpinan lembaga bekerja berdasarkan standar bersama, bukan berdasarkan kebiasaan pribadi yang berbeda antarindividu.

Peran SOP juga terlihat dalam pengendalian risiko operasional. Tanpa prosedur baku, lembaga berpotensi menghadapi keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, hilangnya dokumen penting, ketidakteraturan pengarsipan, dan perbedaan perlakuan terhadap peserta didik. Goetsch dan Davis (2021) menyatakan bahwa manajemen mutu menuntut konsistensi proses agar

organisasi dapat menghasilkan layanan yang stabil. Dalam pendidikan, stabilitas proses menjadi penting karena mutu lulusan tidak mungkin dicapai tanpa proses pembelajaran, layanan, dan evaluasi yang teratur.

SOP mendukung transparansi karena setiap aktivitas memiliki bukti kerja yang dapat diperiksa. Bukti tersebut dapat berupa formulir, notulen, daftar hadir, laporan evaluasi, instrumen supervisi, dan dokumen tindak lanjut. Dalam siklus SPMI, bukti kerja menjadi dasar evaluasi dan pengendalian mutu. Nata (2018) menekankan bahwa pengelolaan pendidikan Islam membutuhkan stabilitas proses dan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, SOP dapat membantu lembaga menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau tekanan sesaat.

Selain itu, SOP dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Lembaga pendidikan saat ini tidak hanya dinilai dari hasil akademik, tetapi juga dari ketepatan layanan, tata kelola keuangan, komunikasi dengan orang tua, kedisiplinan administrasi, dan kemampuan merespons keluhan. SOP

memberikan dasar bagi lembaga untuk menjelaskan proses kerja kepada pemangku kepentingan. Engkoswara dan Komariah (2022) menekankan bahwa administrasi pendidikan harus mendukung efektivitas organisasi dan keteraturan sistem kerja. Oleh karena itu, SOP dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Peran strategis SOP semakin penting ketika lembaga menghadapi proses akreditasi dan evaluasi eksternal. Dokumen SOP dapat menjadi bukti bahwa lembaga memiliki sistem kerja yang dirancang, dilaksanakan, dan diperbaiki secara sadar. BAN-PDM (2020) menempatkan keterlaksanaan sistem mutu sebagai bagian dari penilaian kelembagaan. SOP yang baik tidak hanya disimpan sebagai arsip, tetapi digunakan dalam praktik kerja harian. Dengan cara ini, SOP berubah dari dokumen administratif menjadi perangkat manajemen mutu yang hidup.

2. Mekanisme Penyusunan dan Implementasi SOP Penjaminan Mutu

Penyusunan SOP penjaminan mutu perlu dimulai dari pemetaan

proses utama lembaga. Proses utama mencakup perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, layanan peserta didik, pengelolaan sarana prasarana, pengarsipan dokumen, supervisi akademik, komunikasi dengan orang tua, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Pemetaan ini penting agar SOP tidak disusun secara terpisah dari kebutuhan nyata lembaga. Kurniadin dan Machali (2020) menekankan bahwa manajemen pendidikan perlu berjalan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling terhubung.

Tahap berikutnya adalah menentukan tujuan, ruang lingkup, definisi istilah, penanggung jawab, langkah kerja, standar waktu, formulir, dan indikator keberhasilan. Struktur tersebut membantu setiap pelaksana memahami batas kewenangan dan ukuran keberhasilan kerja. Jika unsur ini tidak ditetapkan, SOP dapat menimbulkan kebingungan karena setiap unit menafsirkan prosedur dengan cara berbeda. Dalam praktik penjaminan mutu, kejelasan peran menjadi faktor penting karena proses mutu melibatkan pimpinan, guru, staf administrasi, peserta didik, orang tua, komite, dan pihak eksternal.

Penyusunan SOP juga perlu dilakukan secara partisipatif. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap prosedur yang disusun. Engkoswara dan Komariah (2022) menegaskan bahwa administrasi pendidikan memerlukan koordinasi dan partisipasi agar sistem kerja dapat berjalan efektif. Hasan (2024) juga menekankan bahwa desain SOP yang partisipatif dapat mengurangi resistensi pada tahap implementasi. Partisipasi membuat SOP lebih realistis karena disusun berdasarkan pengalaman pihak yang menjalankan pekerjaan secara langsung.

Setelah SOP disusun, lembaga perlu melakukan uji keterbacaan dan uji keterlaksanaan. Uji keterbacaan dilakukan untuk memastikan bahasa SOP mudah dipahami. Uji keterlaksanaan dilakukan untuk melihat apakah langkah kerja dalam SOP dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. SOP yang terlalu ideal tetapi tidak sesuai dengan kapasitas lembaga akan sulit diterapkan. Oleh karena itu, revisi SOP perlu dilakukan sebelum dokumen ditetapkan secara resmi oleh pimpinan lembaga.

Implementasi SOP membutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan supervisi. Sosialisasi menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat SOP. Pelatihan memberikan kemampuan teknis kepada pelaksana. Supervisi memastikan prosedur benar-benar dijalankan. Usman (2024) menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan harus mampu menggerakkan anggota organisasi melalui arahan, teladan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, pimpinan tidak cukup hanya mengesahkan SOP, tetapi juga perlu memastikan bahwa SOP dipahami dan digunakan dalam pekerjaan harian.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk mengembangkan e-SOP. Digitalisasi SOP dapat memudahkan penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan distribusi dokumen. Deliana (2020) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan Islam dapat meningkatkan efisiensi tata kelola lembaga. Johnston (2023) juga menekankan bahwa transformasi digital dalam manajemen sekolah mempercepat respons organisasi terhadap perubahan kebutuhan layanan. Dengan e-SOP, lembaga

dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak dan memperkuat pelacakan bukti kerja.

Tahap penting lain adalah audit mutu internal. Audit dilakukan untuk melihat kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik di lapangan. Hasil audit menjadi dasar untuk menyusun tindakan korektif dan tindakan peningkatan. Sallis (2022) menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan memerlukan perbaikan berkelanjutan. Melalui audit berkala, lembaga dapat menemukan bagian SOP yang tidak efektif, terlalu panjang, tidak relevan, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dengan demikian, SOP tetap bersifat dinamis dan dapat diperbarui sesuai perubahan lingkungan pendidikan.

3. Kendala Implementasi SOP

Penjaminan Mutu dan Solusi

Strategis

Kendala pertama dalam implementasi SOP adalah resistensi budaya organisasi. Sebagian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat memandang SOP sebagai tambahan pekerjaan administratif. Pandangan ini muncul ketika SOP diperkenalkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai manfaatnya.

Badrudin (2022) menjelaskan bahwa perubahan strategi dalam organisasi pendidikan memerlukan kesiapan budaya dan komunikasi yang jelas. Oleh karena itu, pimpinan lembaga perlu menjelaskan bahwa SOP bertujuan memudahkan pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan melindungi pelaksana dari ketidakjelasan tanggung jawab.

Kendala kedua adalah rendahnya literasi manajerial dan literasi mutu. Beberapa lembaga belum terbiasa menyusun prosedur kerja secara sistematis. Akibatnya, SOP hanya menyalin dokumen lembaga lain tanpa menyesuaikan kondisi internal. Munir (2022) menunjukkan bahwa hambatan implementasi SOP di madrasah dapat berkaitan dengan rendahnya pemahaman terhadap fungsi SOP sebagai instrumen mutu. Solusi yang dapat dilakukan adalah pelatihan penyusunan SOP, pendampingan oleh tim penjaminan mutu, dan pembentukan kelompok kerja kecil pada setiap unit layanan.

Kendala ketiga adalah keterbatasan sarana, anggaran, dan teknologi. SOP yang berkaitan dengan layanan digital tidak akan berjalan optimal jika lembaga belum memiliki perangkat, jaringan internet,

sistem penyimpanan data, atau kompetensi pengguna yang memadai. Siagian (2023) menegaskan bahwa strategi organisasi membutuhkan kesesuaian antara tujuan, sumber daya, dan lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga perlu menyusun prioritas pengembangan. Zazin (2021) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan yang mendukung mutu kelembagaan. Dana perlu diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan.

Kendala keempat adalah tumpang tindih kewenangan. SOP yang tidak menjelaskan penanggung jawab dan alur persetujuan dapat menimbulkan kebingungan. Akibatnya, pekerjaan menjadi lambat dan risiko saling menyalahkan meningkat. Fattah (2023) menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan memerlukan kejelasan struktur dan pengendalian. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun matriks tanggung jawab, misalnya menggunakan model *responsible, accountable, consulted, and informed*. Matriks ini membantu lembaga menentukan siapa pelaksana, siapa penanggung jawab akhir, siapa yang

perlu diajak berkonsultasi, dan siapa yang perlu diberi informasi.

Kendala kelima adalah lemahnya evaluasi dan tindak lanjut. Beberapa lembaga memiliki SOP, tetapi tidak pernah mengevaluasi efektivitasnya. Dokumen hanya tersimpan dalam arsip dan tidak dijadikan rujukan kerja. Kondisi ini membuat SOP kehilangan fungsi sebagai instrumen mutu. Evans (2023) menjelaskan bahwa kinerja mutu membutuhkan pengukuran dan umpan balik. Oleh karena itu, lembaga perlu menetapkan jadwal evaluasi SOP, indikator kepatuhan, mekanisme pelaporan, dan tindakan korektif yang jelas.

Solusi strategis atas berbagai kendala tersebut adalah membangun kepemimpinan transformasional. Pimpinan perlu memberi teladan kepatuhan terhadap SOP, membuka ruang dialog, dan menghubungkan SOP dengan tujuan besar lembaga. Usman (2024) menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam menggerakkan perubahan organisasi. Dalam lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan juga perlu menanamkan nilai amanah, disiplin, dan tanggung jawab sebagai dasar budaya mutu. Ketika pimpinan dan

staf memiliki pemahaman yang sama, SOP lebih mudah diterima sebagai kebutuhan bersama.

Lembaga juga perlu menerapkan sistem penghargaan. Penghargaan dapat diberikan kepada unit kerja yang konsisten menjalankan prosedur, menyelesaikan dokumen tepat waktu, dan menunjukkan peningkatan layanan. Mulyasa (2022) menekankan bahwa manajemen berbasis madrasah membutuhkan partisipasi warga sekolah dan dukungan pemangku kepentingan. Sistem penghargaan dapat meningkatkan motivasi internal dan membentuk budaya kompetisi yang sehat. Penghargaan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dapat berupa pengakuan, kesempatan mengikuti pelatihan, atau publikasi praktik baik.

Dengan demikian, keberhasilan SOP tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen, tetapi juga oleh kesiapan budaya, kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem evaluasi. SOP harus diperlakukan sebagai dokumen hidup yang terus diperbaiki. Jika SOP disusun secara partisipatif, diterapkan melalui pelatihan, diawasi melalui audit, dan diperbarui berdasarkan data, lembaga pendidikan Islam akan

memiliki fondasi yang lebih kuat untuk membangun budaya mutu berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, implementasi Standard Operating Procedure (SOP) merupakan instrumen penting dalam penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lembaga pendidikan Islam. SOP membantu menerjemahkan kebijakan mutu ke dalam langkah kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Dengan SOP, proses akademik dan nonakademik dapat berjalan lebih konsisten karena setiap unit memiliki panduan kerja, batas tanggung jawab, dokumen pendukung, dan indikator keberhasilan yang sama.

SOP juga berperan dalam membangun budaya mutu. Fungsi tersebut terlihat dari kemampuannya memperkuat akuntabilitas, mengurangi kesalahan prosedur, meningkatkan keteraturan dokumentasi, dan mendukung siklus perbaikan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keberhasilan SOP membutuhkan penyusunan partisipatif, sosialisasi, pelatihan,

supervisi, digitalisasi dokumen, serta audit mutu internal secara berkala.

Kendala implementasi SOP umumnya berkaitan dengan resistensi budaya organisasi, rendahnya literasi manajerial, keterbatasan infrastruktur, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya tindak lanjut evaluasi. Kendala tersebut dapat diatasi melalui kepemimpinan transformasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran berbasis prioritas mutu, serta sistem penghargaan bagi unit kerja yang menjalankan prosedur secara konsisten. Oleh karena itu, SOP perlu dipahami sebagai instrumen strategis untuk membangun tata kelola pendidikan Islam yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nata, A. (2018). Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Badrudin. (2022). Manajemen strategi pendidikan Islam: Konsep dan aplikasi terbaru. Bandung: Alfabeta.
- BAN-PDM. (2020). Panduan akreditasi sekolah/madrasah berbasis instrumen terbaru. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Deliana, H. S. (2020). Sistem informasi manajemen pendidikan Islam di era 4.0. Surabaya: UINSA Press.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2022). Administrasi pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Evans, J. R. (2023). Managing for quality and performance excellence. Washington, DC: Cengage Learning.
- Fattah, N. (2023). Sistem penjaminan mutu pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. (2021). Quality management for organizational excellence. Washington, DC: Pearson Education.
- Hasan, R. (2024). Participatory SOP design in Islamic schools. *International Journal of Education and Management*, 7(1), 12-18.
- Johnston, K. (2023). Digital transformation in school management. New York: Springer.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniadin, D., & Machali, I. (2020). Manajemen pendidikan: Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. (2009). Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). Manajemen berbasis madrasah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2022). Barriers to SOP implementation in madrasahs. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 310-322.
- Qomar, M. (2021). Manajemen pendidikan Islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rohmah, S. (2022). Internal quality assurance in madrasah. Surabaya: UINSA Press.
- Sallis, E. (2022). Total quality management in education. London: Routledge.
- Siagian, S. P. (2023). Manajemen strategik dalam organisasi pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyanto. (2023). Instructional leadership and quality assurance. *Journal of Educational Policy and Management*, 9(3), 55-60.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-5). Bandung: Alfabeta.
- Usman, H. (2024). Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan terkini. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zazin, N. (2021). Financial management and school quality. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.